INDONESIA DIPLOMACY THROUGH THE SHERPA TRACK IN THE G20 FORUM 2015-2022

Oleh : Farhan Firdaus

Email : (farhan.firdaus0349@student.unri.ac.id)

Pembimbing : Dr. Yessi Olivia, S.IP, M.Int.Rel

Bibliography : 17 Books, 14 Journal Article, 3 Thesis, 12 Official Report, 29 Sites

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The G20 is a non-formal international forum that was established against the backdrop of concerns about global economic issues. Over time, the G20 has evolved into a complex international forum with two main tracks: the finance track, which focuses on economic, financial, and fiscal issues, and the sherpa track, which addresses non-systemic issues that can impact the economy or human security, such as development, humanitarian issues, social poverty, technology, health, and others. The sherpa track consists of two main discussions: the working group (government) and the engagement group (non-governmental). Indonesia has been a member of the G20 since its formation, along with 18 other countries and one regional organization. Indonesia is part of the G20 due to its large Gross Domestic Product (GDP). In 2022, Indonesia held the G20 presidency and brought forward several national issues and interests. Indonesia demonstrated its diplomatic efforts, such as its active participation in the sherpa track.

This research employs a qualitative method, involving data collection through interviews and document analysis, drawing from books, journal articles, news, reports, and websites related to Indonesia's diplomacy in the G20 forum through the sherpa track.

The results of this study show that Indonesia's diplomacy in the sherpa track demonstrates good engagement. However, Indonesia's status as a middle power poses challenges in its efforts to voice, represent, and advocate for its interests in the forum alongside great powers. To make Indonesia's diplomacy effective, it is necessary to build strength and capacity in collaboration with other middle-power countries.

Keywords : G20, sherpa track, diplomacy, Indonesia, middle power.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara *emerging countries*; negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia; sebagai negara dengan mayoritas islam terbesar dunia, dan negara demokrasi baru yang dalam tahap konsolidasi, merupakan sebuah keistimewaan juga prestasi yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Indonesia memulai keaktifannya dalam kancah internasional pasca reformasi yang berawal dari tahun 1999. Saat itu, terjadi krisis moneter yang menimpa negara-negara Asia dan perlambatan ekonomi dunia yang diakibatkan melemahnya nilai tukar Dollar AS pada periode tersebut termasuk Indonesia.

Di periode yang sama, dunia saat itu tengah digencarkan dengan fenomena globalisasi yang semakin meningkat. Dengan mendominasinya pemikiran barat/liberalisme, menghasilkan struktur baru pada dunia internasional yang condong pada kerjasama dan dependensi antar satu negara dengan negara lainnya. Salah satu forum multilateral yang juga ikut terbentuk adalah G20. Dengan dasar ketidakmampuan G7 sendiri dalam mengatasi permasalahan ekonomi saat itu, terkhusus dalam menjaga stabilitas finansial dan perekonomian global. Pandangan saat itu adalah perlunya negara-negara berpendapatan menengah dan negara-negara yang memiliki pengaruh ekonomi secara terpadu berpartisipasi dalam perundingan untuk mencari solusi permasalahan ekonomi global.

Indonesia masuk menjadi anggota G20 karena pencapaian ekonominya di tingkat regional dan

global. Pertumbuhan GDP Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 1980 hingga 1990, tercatat pertumbuhan GDP Indonesia berhasil menyentuh angka 10,92%, Walaupun ekonomi Indonesia sempat mengalami kontraksi pada tahun 1998 dengan nilai terkoreksi sebesar -13,13%. Namun, Indonesia mulai mengalami kebangkitan ekonominya pada masa reformasi. Tercatat pada tahun 2007, Indonesia terkoreksi tumbuh sebesar 6,35%¹. Merupakan sebuah pencapaian terbesar pada masa reformasi.

Status negara dengan kekuatan menengah (*middle-power*) tidak membuat Indonesia ragu dalam menjalankan misi diplomasinya. Bahkan dalam beberapa kesempatan yang telah dijelaskan seperti menjadi representatif bagi negara berkembang, membuat Indonesia dirasa memiliki nilai strategis (*strategic values*) tersendiri sehingga negara dengan *great-power* juga tidak dapat mengabaikannya. Keterlibatan Indonesia juga didukung oleh kepentingan posisi daya tawar negosiasi yang tinggi, karena dengan berada dalam forum global, keputusan Indonesia tentu akan menentukan, terutama pada negara-negara berkembang. Hal ini mengisyaratkan bahwa Indonesia walaupun hanya berstatus sebagai *middle-power state* namun dapat dilihat berdasarkan uraian, mampu merepresentasikan negara berkembang dalam forum multilateral baik yang membahas tentang isu dalam *Finance track* maupun *Sherpa*

¹ databoks, "Inilah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sejak 1961," Katadata Media Network, 2018, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/31/inilah-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-sejak-1961>.

track. Seperti studi kasus Indonesia dalam *Sherpa meeting* atau pertemuan Sherpa saat Presidensi G20 Italia tahun 2021². Pada kesempatan ini, Co-Sherpa G20 Indonesia kembali menekankan pentingnya kesepakatan pada G20 dan untuk dapat diimplementasikan seperti pada program dan isu-isu prioritas Sherpa track terkhususnya (Pendidikan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, anti-korupsi, budaya, pembangunan, kesehatan, keuangan, perdagangan, investasi, digitalisasi ekonomi, stabilisasi rantai pangan dan pertanian. Selain itu, saat kepresidensian dipangku oleh Indonesia ditengah situasi ketidakstabilan negara-negara pasca pandemi dan beberapa konflik bersifat tradisional kembali bermunculan, membuat keamanan dunia ditengah kedilemaan. Hasilnya, kedilemaan ini membuat permasalahan keamanan tidak hanya state-centric menjadi terancam, tetapi juga pada keamanan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Co-Sherpa Indonesia, Edi Prio Pambudi dalam konferensi pers *C20 Policy Dialogue Meeting* di Jakarta. Edi mendorong untuk negara-negara G20 ikut peduli dan memperhatikan masalah kemanusiaan ditengah memanasnya dunia internasional akibat konflik Rusia-Ukraina. Edi juga mengatakan bahwa negara-negara G20 kini sadar dengan adanya ancaman kemanusiaan seperti krisis pangan, energi, politik, hingga individu manusia itu sendiri yang akan

² Rukimi, D.A, Wiwiek & M.Fathun, Laode “Diplomasi Ekonomi Indonesia di Dalam Rezim Ekonomi G20 Pada Maa Pemerintahan Joko Widodo” melalui <https://intermestic.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/download/223/63> pada tanggal 15 Desember 2022.

menimpa dunia internasional sebagai konsekuensi ketidakstabilan politik dunia terhadap konflik Rusia-Ukraina dan proses dunia yang belum terlalu pulih pasca pandemi Covid-19.

KERANGKA TEORI

Tingkat Analisis : Negara (State-Level)

Level analisis atau tingkat analisis merupakan tingkatan objek yang menjadi fokus utama dalam pembahasan sebuah penelitian. Level analisis dalam penelitian ini merupakan atau berada pada level negara (state-level analysis). Pada level analisis ini, penjelasan tentang perilaku negara ditentukan oleh faktor-faktor internal dari negara tersebut. Menurut Rourke, yang diperlukan ketika seorang peneliti menggunakan level analisis negara adalah pemahaman tentang bagaimana berbagai aktor (birokrat, kelompok kepentingan dan badan legislatif) di dalam negara berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Tingkat analisis negara akan menghasilkan penjelasan yang tidak terlalu makro seperti yang dihasilkan pada tingkat analisis sistem, namun tidak pula terlalu mikro seperti ketika menggunakan level analisis individu.

Diplomasi Negara Berkekuatan Menengah (Middle-power Diplomacy)

Middle-power diplomacy atau diplomasi kekuatan menengah pada dasarnya sebuah karakter dari kebijakan luar negeri dari beberapa negara yang dikelompokkan kedalam kekuatan menengah (*middle power*). Secara sederhananya, untuk mengenal kekuatan menengah ini dapat dilihat dari

posisinya yaitu berada di antara kekuatan besar (*major power*) dan kecil (*small state*). Meskipun definisi *middle power* belum bersifat mutlak, namun pengelompokan tersebut didasarkan pada kekuatan, kapasitas, dan pengaruhnya yang tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil dalam ruang lingkup internasional, serta cenderung menunjukkan dukungannya terhadap stabilitas sistem dunia³. Selain itu, negara kekuatan menengah pun memiliki peran yang signifikan, antara lain, sebagai katalisator dalam mempromosikan isu-isu global, fasilitator dalam membangun kerja sama internasional, serta manajer dalam mengembangkan lembaga dan norma internasional. Pada perkembangannya, aktivitas diplomasi negara kekuatan menengah sering disebut sebagai *middlepowermanship*, yaitu kecenderungan negara untuk menggunakan kerja sama multilateral dalam menyelesaikan permasalahan global, berkompromi dalam sengketa internasional, dan menerapkan gagasan *good international citizenship* untuk menjalankan aktivitas diplomasi⁴.

Aktivitas diplomasi negara-negara kekuatan menengah cenderung serupa karena pada dasarnya mereka selalu berpegang pada nilai dan norma internasional. Selain itu, mereka pun proaktif, reformis, dan transparan di arena internasional, sehingga arah

kebijakannya mudah diprediksi. Lebih lanjut, beberapa karakteristik aktivitas diplomasi negara kekuatan menengah adalah sebagai berikut. Pertama, negara-negara kekuatan menengah cenderung mengedepankan diplomasi multilateral, khususnya dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan global. Bagi negara-negara kekuatan menengah, aktivitas multilateral akan memaksimalkan daya tawar mereka dalam bernegosiasi, menghindari dominasi dan keputusan sepihak dari *great power*. Maka dari itu, kerjasama bilateral umumnya dihindari. Mereka akan memilih untuk tetap mempertahankan lembaga internasional yang sudah ada, bahkan terkadang membentuk kerja sama dan lembaga internasional baru untuk menyelesaikan permasalahan global.

METODE PENELITIAN

Terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni menjelaskan peran Indonesia dalam mengangkat isu keamanan manusia dalam forum multilateral G20, maka tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif, yang bersifat eksplanatif. Penelitian ini juga akan memfokuskan pada Indonesia sebagai aktor utama yang berstatus sebagai negara *middle-power* dalam memainkan peran membawakan isu keamanan manusia dalam forum multilateral G20 yang pada dasarnya forum ini berdiri dengan adanya background story pada permasalahan ekonomi dunia pada saat dibentuknya. Eksplanatif ini juga akan membantu peneliti dalam menjelaskan penelitiannya disertai dengan teori yang relevan digunakan dalam penelitian.

³ Jordaan Eduard, "The Concept of a Middle Power in International Relations: Distinguishing between Emerging and Traditional Middle Powers," *Politikon: South African Journal of Political Studies* 30, no. 1 (2003): 165–81, https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=1393&context=soass_research. Hal. 165.

⁴ Eduard.

DIPLOMASI INDONESIA DI ERA REFORMASI

Konstitusi Pembukaan UUD 1945 dan UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Politik luar negeri Indonesia bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional serta tercapainya tujuan nasional, khususnya dalam hal pembangunan nasional yang terinspirasi oleh politik luar negeri Wakil Presiden Indonesia yang pertama, Mohammad Hatta yakni “mendayung diantara dua karang” atau dikenal dengan prinsip politik bebas-aktif, Hal ini diperjelas oleh bapak Billy Wibisono dalam wawancara langsung, dengan pernyataan beliau :

“Indonesia menjalankan diplomasi memiliki arti penting, yakni untuk menjalankan konstitusi kita (Pembukaan UUD 1945) yang berlandaskan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Diplomasi Indonesia menurut saya adalah sebuah usaha dalam memperjuangkan kepentingan nasional yang berprinsip, apa prinsipnya? Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wakil Presiden ke-1 kita, Mohammad Hatta ‘mendayung diantara dua karang’ atau kita kenal dengan nama politik bebas aktif dan ini tetap kita terapkan prinsipnya dalam diplomasi kita”

Seiring dengan berkembangnya dunia internasional, setiap negara memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui perundingan di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral. Begitupun dengan Indonesia, pemerintah harus cerdas dalam memilih sikap dan menempatkan posisi Indonesia dalam lingkup dunia internasional. Target jangka pendek

serta jangka panjang yang ingin dicapai dalam menjalankan kepentingan nasional ini perlu dirancang terlebih dahulu agar jelas terlihat biaya dan manfaatnya.

Mengingat akan pentingnya sebuah strategi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia, kita perlu belajar dari kejadian dan peristiwa masa lalu yang akan mengantarkan Indonesia untuk kestabilan dan keteraturan hubungan dengan dunia Internasional meskipun terdapat perubahan situasi Internasional maupun domestik dari masa ke masa. Masa transisi pemerintahan pada masa berakhirnya pemerintahan orde baru yang kemudian melahirkan reformasi ini sangat berpengaruh terhadap pola pemerintahan di Indonesia. Masa ini mengubah bukan hanya pada politik yang dijalankan di dalam negeri, tetapi juga strategi dalam menjalankan politik luar negeri. Meskipun terjadi reformasi dalam perpolitikan Indonesia, tentunya hal ini memberikan legitimasi demokratisasi dalam politik luar negeri Indonesia. Sebagai bridgebuilder, Indonesia telah melakukan tugasnya bahkan sejak dari awal kemerdekaan, orde baru hingga Era reformasi.

Masa Reformasi diawali dengan pemerintahan Presiden B. J. Habibie, lalu dilanjutkan oleh Abdurahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan sekarang Joko Widodo. Pasca-1998, Presiden Habibie, Gus Dur dan Megawati gencar untuk memulihkan kredibilitas dan citra Indonesia di mata internasional. Contohnya, Presiden Habibie menerapkan kebebasan pers, memberikan kebebasan kepada rakyat

Timor Timur untuk merdeka dan liberalisasi partai politik. Lalu, Presiden Gus Dur menerapkan diplomasi persatuan dengan melakukan perjalanan internasional lebih dari 80 negara demi mendapatkan dukungan dunia terhadap kedaulatan Indonesia yang saat itu sedang menghadapi masalah disintegrasi bangsa. Presiden Megawati kembali melanjutkan perjalanan dengan mengunjungi 27 negara untuk mendapatkan pemulihan dari kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kedaulatan wilayah negara dan isu separatisme daerah. Namun citra yang diharapkan belum didapatkan karena kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap presidennya, sehingga tidak heran bila masa jabatan presiden hanya berlangsung kurang lebih 1-3 tahun. Akan tetapi, salah satu hal yang menjadi dasar perpolitikan luar negeri dan diplomasi Indonesia yakni saat Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Hassan Wirahuda pada tahun 2001. Saat itu, Diplomasi yang dahulunya berifat eksklusif dan state-centric kemudian berubah menjadi lebih transparan, penerapan diplomasi publik hingga keterkaitan beberapa elemen terkait dalam membuat kebijakan perpolitikan luar negeri ataupun diplomasi Indonesia pada saat itu, hal ini disampaikan oleh Siti Daulah Khoiriati, Dosen Jurusan Hubungan Internasional UGM, dalam wawancara langsung sebagai berikut :

“Jika berbicara konteksnya (Diplomasi) di masa reformasi, maka yang saya ingat dan sampai saat ini menjadi rujukan para pejabat di Kemlu, diplomasi Indonesia mengalami perubahan ketika Bapak Hassan Wirajuda (2001) terpilih sebagai

Menteri Luar Negeri untuk Indonesia. Kepemimpinan beliau, membuka isu politik luar negeri dan diplomasi kepada masyarakat yang dahulunya merupakan isu yang eksklusif dan state-centric, berubah ke diplomasi publik dan transparan. Beliau melibatkan banyak elemen ataupun institusi terkait dalam menentukan kebijakan luar negeri dan langkah diplomasi yang hendak dilakukan pada saat itu seperti DPR, Diaspora, Tokoh-tokoh penting dan masyarakat yang paham di isunya. Hal ini juga disetujui oleh para akademisi lainnya dalam dunia diplomasi Indonesia.”

Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden melalui pemilihan langsung 2004 mewarisi persoalan multidimensi akibat krisis ekonomi yang belum berhasil dituntaskan secara utuh oleh B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati, sehingga dalam politik luar negerinya Susilo Bambang Yudhoyono mengambil langkah untuk pemulihan citra Indonesia di mata internasional dengan cara menyelesaikan permasalahan domestik terlebih dahulu. Hal ini juga menjadikan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai masa yang baik bagi Diplomasi Indonesia karena konsistensi demokratisasi yang coba dibangun dimasa pemerintahannya dan juga beberapa agenda penting yang jelas di masa beliau dengan Indonesia sebagai inisiasinya cukup memuaskan dunia diplomasi Indonesia pada saat itu seperti adanya Bali Democracy Forum dan awal adanya Leader Meetings G20 .

G20 DAN SHERPA TRACK

Negara-negara anggota G20 berasal dari negara maju dan negara

berkembang yang diurutkan dengan nilai Gross Domestic Product (GDP) besar dunia seperti, Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Inggris dan Jepang. Selain itu, Uni Eropa juga merepresentasikan negara-negara berkembang. Sementara, negara anggota dari kelompok negara berkembang di antaranya adalah Tiongkok, Brazil, India, Afrika Selatan dan Indonesia. Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN dalam G20.

Untuk G20 memiliki beberapa agenda besar namun agenda ini diklasifikasikan menjadi dua pembagian besar pembahasan yakni sebagai berikut:

1. Sherpa Track atau Jalur Sherpa fokus tentang politik dan berorientasi pada pembangunan masalah non-keuangan. Itu kebijakan delegasi sherpa dan analisis teknis untuk kelompok kerja ditarik dari pejabat masing-masing negara anggota dan internasional organisasi.
2. Finance Track atau Jalur Finansial fokus pada keuangan dan ekonomi permasalahan, antara lain: moneter, fiskal dan kebijakan nilai tukar; investasi infrastruktur; regulasi keuangan; inklusi keuangan; Dan perpajakan internasional. Itu Track terdiri dari semua menteri keuangan dan Gubernur Bank Sentral.

Struktur koordinasi Sherpa Track pada Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 terdiri atas 11 Working Group (WG) yaitu Anti Corruption; Agriculture; Environment and Climate

Sustainability; Development; Digital Economy; Energy Transitions; Education; Employment; Health; Tourism; Trade, Industry, and Investment; dan 1 Inisiatif yaitu EMPOWER. Serta terdapat 10 Engagement Group (EG) yaitu Parliament 20; Supreme Audit Institution 20; Business 20; Civil 20; Urban 20; Women 20; Think 20; Science 20; Labour 20; dan Youth 20.

LANGKAH DIPLOMASI INDONESIA DALAM FORUM G20 SHERPA TRACK

Langkah diplomasi Indonesia dalam G-20 sebagai forum utama kerjasama ekonomi internasional sangat jelas apabila dilihat dari posisinya yaitu mendukung secara penuh wadah formal yang merangkul negara maju dan negara berkembang. Dalam pidato tahunannya di depan Dewan Perwakilan Rakyat bulan Agustus 2010, Presiden Susilo Bambang Yudoyono memperlihatkan antusiasisme yang tinggi bagi Indonesia untuk memberi kontribusi bagi penataan struktur finansial global sebagaimana tercermin dalam kutipan di atas. Indonesia mengakui bahwa dalam konteks sistem internasional yang sedang berubah pasca berakhirnya Perang Dingin, ruang gerak Indonesia dalam pentas internasional kini terbuka semakin lebar.

Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa keterlibatannya dalam G-20 memberi peluang bagi Indonesia untuk semakin mendunia:

”Inilah saatnya prestasi, produk, budaya dan ide-ide Indonesia semakin menjadi bagian dari dinamika di tingkat global”.

Peningkatan kinerja diplomasi Indonesia yang bebas, aktif dan transformatif diakui oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono sebagai keharusan untuk menciptakan peluang bagi realisasi kepentingan nasional Indonesia. Pada Bab IV ini mendeskripsikan langkah diplomasi dan kepentingan Indonesia dalam G-20 dan menganalisis hasil dari langkah diplomasi Indonesia dalam memainkan perannya dalam proses G-20. Bab ini juga akan mendeskripsikan Indonesia sebagai anggota G-20 dalam memenuhi komitmen-komitmennya terhadap G-20 dan tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam proses diplomasinya di G-20.

Indonesia adalah negara dengan GDP (*Gross Domestic Product*) yang besar dan G20 adalah forum yang terbetuk atas negara-negara kekuatan ekonomi besar dunia. Akan tetapi, Indonesia masi dikategorikan negara berkembang dan hal ini menjadi sebuah keterbatasan apabila Indonesia sebagai individu dihadapkan dengan negara-negara dengan modal yang tidak hanya mengandalkan dari segi ekonomi, tetapi juga teknologi, sumber daya, militer, dan kekuatan lain-lainnya. Hal ini juga dikatakan oleh Dra. Siti Daulah Khoiriati, MA yakni⁵:

“Indonesia sudah memiliki jejak historis sebagai perwakilan negara berkembang dan emerging countries. Para scholars mereferensikan Indonesia sebagai negara yang aktif dalam mewakili negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Dengan peran yang kerap

⁵ Hasil Wawancara bersama Dra.Siti Daulah Khoiriati, MA. Akademisi, Dosen Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Tanggal 5 Juli 2023, via Zoom Meetings.

dilakukan contohnya mediator (negara penengah) dan representatif.”

Lalu dengan hal ini, Indonesia juga aktif menyuarakan isu-isu yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan nasionalnya. Diplomasi sendiri adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memberi pengaruh kepada negara lain atas dasar konstitusi serta kepentingan dari negara. Indonesia melakukan hal ini dalam forum G20 terkhususnya dalam Sherpa Track.

Sherpa Track, adalah isu ekonomi yang bersifat non-finansial yang memberikan *impact* yang berkelanjutan pada ekonomi sebuah negara. Seperti isu pembangunan, sosial, budaya, norma dan lain-lainnya. Menurut bapak Billy Wibisono, Indonesia telah membuat pencapaian yang baik selama berada di forum G20 dan Sherpa Track, berikut adalah pernyataan beliau⁶:

“Dalam G20-pun Indonesia tetap sama, Kita memiliki diplomasi yang baik dalam hal memperjuangkan kepentingan kita juga mewakili negara-negara berkembang, untuk khusus Sherpa Track, terdapat beberapa working group didalamnya. Kita aktif dalam semua working group bahkan beberapa working group yang ada sebelumnya merupakan workstream atau paperwork dna terhetnti disitu saja. Jadi, saya melihat Indonesia memiliki peran yang sangat baik dalam Sherpa Track, lalu posisi ini maksudnya posisi apa? Jika diplomasi maka kita tetap

⁶ Hasil Wawancara bersama Billi Wibisono, PELH Kementerian Lua Negeri RI, Tanggal 27 Juni 2023, via Zoom Meetings.

pada bebas aktif, jadi diplomasi yang memegang prinsip.”

REALISASI DIPLOMASI INDONESIA DALAM SHERPA TRACK

Indonesia sebagai rumah penguatan ekonomi peradaban dunia, menjadi dorongan kuat bagi Indonesia untuk memainkan peran serius dalam pertemuan-pertemuan G-20. Bagi Indonesia, G-20 pertama-tama adalah sebuah forum ekonomi yang penting di mana Indonesia dapat mempromosikan kepentingan ekonomi nasionalnya dan berkontribusi pada pembentukan tata kelola ekonomi global.⁷ G-20 telah dibentuk tahun 1999 ketika dunia menghadapi krisis ekonomi yang terjadi di beberapa negara di Asia. Pada saat itu G-20 mendiskusikan pendekatan-pendekatan ekonomi untuk mengatasi krisis tersebut. G-20 telah memainkan peran lebih besar sejak tahun 2007 ketika krisis finansial global yang lain melanda perekonomian global.

Indonesia membantu penanganan krisis dan Pembentukan citra global, sebagai satu-satunya anggota permanen menurut forum G20 di kawasan melalui kiprahnya pada menginisiasi pembentukan ASEAN menjadi jembatan pada mewadahi dilema-dilema ekonomi daerah, keberhasilan Indonesia dalam mengatasi krisis keuangan dalam tahun 1998 yang dievaluasi relatif baik, partisipasi konkret Indonesia pada setiap lembaga ekonomi global, dan juga salah satu negara pada kawasan yang memiliki

skala besar pada perdagangan global. Hal tersebut menjadi tonggak harapan untuk mengutarakan kepentingan negara-negara ASEAN dan negara berkembang lainnya. Negara berkembang sangat berharap akan terbukanya akses pasar global bagi komoditas yg didapatkan lantaran selama ini terkendala menggunakan adanya kebijakan perlindungan yang diterapkan oleh Eropa, Amerika Serikat, dan negara besar lainnya.

Pada G20 di bawah Presidensi Jerman, Indonesia berperan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat seperti arahan Presiden pada Sidang Kabinet sehingga terdapat beberapa agenda, yaitu digitalisasi, ketenagakerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia sendiri akan membagikan pengalamannya mengelola transisi ekonomi digital dengan memperkuat kontribusi masyarakat melalui success story di sektor transportasi publik. Peranan Indonesia lainnya yaitu mengajukan Global Expenditure Support Fund (GESF) yang merupakan dukungan terhadap negara-negara berkembang dalam mengamankan anggaran nasional dari krisis likuiditas, Global Infrastructure Connectivity Alliance (GICA) yang mendukung keterhubungan melalui kooperasi dan pertukaran pengetahuan, dan juga Inclusive Digital Economy Accelerator (IDEA HUB) yang merupakan forum berkumpulnya para unicorn di seluruh negara G20 untuk saling bertukar ide. Indonesia pernah menjadi Co-Chair Anti Korupsi bersama Prancis pada tahun 2010-2011, Co-Chair Working Group on Energy and Commodities Markets bersama Inggris 2012, Tuan

⁷ David Camroux, “Engaging Indonesia,” *SSUE*, September 27, 2013, https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EU_ISSFiles/Brief_01.pdf. Hal. 4

Rumah pertemuan Study Group on Financing for Investment di Bali pada tahun 2013, serta Tuan Rumah pertemuan Infrastructure and Investment Working Group di Jakarta pada tahun 2014 dan Bali pada tahun 2016. Kemudian, Indonesia secara resmi terpilih menjadi Presidensi Group of Twenty (G20) pada tahun 2022 dengan tema “Recover Together, Recover Stronger” yang meminta negara-negara di dunia untuk mencapai pemulihan yang kuat bersama-sama. Dalam kesempatan kali ini, Indonesia akan membawa beberapa topik utama, yaitu Sistem Kesehatan Dunia, Transformasi Ekonomi dan Digital, dan Transisi Energi. Dalam upaya transformasi ekonomi dan digital, Pemerintah sudah mempersiapkan roadmap dan mendorong infrastruktur digitalisasi sehingga diperlukan pemanfaatan sistem komunikasi satelit orbit rendah atau low earth orbit satellite dalam meraih pelayanan komunikasi sampai wilayah terpencil dan lebih terjangkau sehingga tidak terjadi kesenjangan digital. Kemudian, inklusi keuangan melalui fintech dan digitalisasi, dengan pembuatan regulatory sandbox diperuntukan melindungi transaksi keuangan masyarakat. Dalam transisi energi, akan dibuat prototipe atau percontohan yang termasuk dukungan finansial yang akan diuji coba dan dievaluasi menjelang KTT G20 dan kebijakan Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah komoditas seperti sustainable palm oil yang didorong menjadi komoditas ekspor andalan Indonesia.

Indonesia juga ikut andil dalam beberapa konferensi. Diantaranya adalah menjadi Co-Chair Anti-

Corruption Working Group berdampingan dengan negara Prancis di tahun 2010 hingga 2011, Co-Chair Working Group on Energy and Commodities Markets berdampingan dengan negara Inggris, menjadi tuan rumah dalam pertemuan Study Group on Financing for Investment di Bali di tahun 2013, menjadi tuan rumah dalam pertemuan Infrastructure and Investment Working Group di Jakarta di tahun 2014 dan di Bali di tahun 2016, dan memegang Presidensi Group of 20 (G20) di tahun 2022. Selain peran yang telah disebutkan di atas, Indonesia juga memiliki peran lainnya dalam G20 yaitu pengusulan beberapa gagasan yang diantaranya *Inclusive Digital Economy Accelerator (IDEA Hub)*, *Global Infrastructure Connectivity Alliance (GICA)*, dan *Global Expenditure Support Fund (GESF)*. Inisiatif Indonesia tidak hanya diwujudkan dalam *proposal Global Expenditure Support Fund (GESF)* dan kebijakan kemudahan likuiditas dana pinjaman yang diberikan pada negara berkembang dan miskin, tapi juga sumbangan langsung melalui ide-ide untuk mereformasi dalam *Working Group 4 (WG4)* yang dimotori oleh Indonesia dan Perancis.

Indonesia bersama dengan Perancis menyelenggarakan pertemuan WG4 di Jakarta dengan berdasarkan pada pertemuan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja Bank Pembangunan Multilateral (*Multilateral Development Banks/ MDBs*) dalam mengatasi krisis serta membenahan manajemen MDB's dalam proses reformasi agar lebih tanggap dan efektif dalam menghadapi krisis lain waktu. Pertemuan tidak

hanya mengundang kedua puluh negara anggota, terdapat IMF dan *World Bank* sebagai *observer* tetap G-20, anggota Bank Regional Pembangunan (*Regional Development Banks/RDB*) serta negara diluar G-20, seperti G-24, Belanda dan Uni Afrika⁸.

Pertemuan WG4 ini merumuskan draft yang mengagendakan finalisasi prinsip-prinsip umum dan *action plan* G-20 terhadap proses reformasi MDBs. Draft tersebut diserahkan pada pertemuan *leaders summi*. Pada dasarnya, pembahasan mengenai mekanisme reformasi MDB's ini bertujuan, pertama, meningkatkan peran Bank Pembangunan Multilateral dalam penyediaan dana cair untuk negara berkembang (*emerging markets*) khususnya jika terjadi krisis⁹. Kedua, pembahasan mengenai peningkatan kecukupan modal bagi seluruh MDB's sebagai instrumen antisipasi dan solusi krisis keuangan akibat terhambatnya arus likuiditas. Terakhir, reformasi manajemen MDB's dalam pengelolaan dana yang bertolak ukur berdasar transparansi, efektifitas peran *country office* serta pembenahan dalam mencapai keseimbangan kuota dan representasi antara negara maju dan negara berkembang.

Dukungan penuh pemerintah Indonesia terhadap adanya pembahasan dalam WG4 ini terangkum oleh yang disampaikan Presiden Yudhoyono agar

⁸ Pada, dkk., *Presidensi G20 Indonesia: Prioritas, Potensi Capaian, Dan Langkah Ke Depan*. Hal.65-66.

⁹ Hasil Wawancara bersama Dra.Siti Daulah Khoiriati, MA. Akademisi Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Tanggal 5 Juli 2023, via Zoom Meetings.

MDB's perlu didukung dan didorong dalam proses reformasi manajemennya serta dibutuhkannya instrumen dana (*budget support*) untuk keberlangsungan pembangunan infrastruktur di negara emerging markets serta program-program untuk mencapai MDGs¹⁰.

AKTIVITAS DIPLOMASI INDONESIA DALAM SHERPA TRACK

Indonesia dalam G20 sudah berjalan sejak organisasi non-formal dunia ini berdiri, selama ini tentu terdapat progress yang telah Indonesia lakukan, tidak terkecuali pada isu iklim dan cuaca ekstrim. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kesadaran akan dampak rising sea level akan sangat mempengaruhi kelangsung bernegaranya. Oleh karena itu, dalam Sherpa Track, Indonesia mencoba melakukan tindakan yakni dengan mewakili beberapa negara kepulauan dunia lainnya tentang adanya persamaan keresahan akan kenaikan permukaan laut ini. Dalam hal ini, Indonesia mencoba menginisiasikan sebuah kerja kelompok yang dapat memberikan impact dan pengawasan langsung mengenai isu ini yakni *Research and Innovation Initiative Gathering* (RIIG). Hal ini juga sebagai aksi Indonesia bersama negara-negara lainnya untuk dapat memprediksi tantangan global dibidang cuaca dan iklim.

Kemudian, untuk mendukung kesuksesan dalam usaha pencegahan perubahan cuaca dan iklim, Indonesia

¹⁰ Hasil Wawancara bersama Dra.Siti Daulah Khoiriati, MA. Akademisi Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Tanggal 5 Juli 2023, via Zoom Meetings.

juga mengutarakan komitmennya dalam penggunaan energi bersih. Indonesia telah mengupayakan hal ini sejak presidensi di Beijing (Tahun) dengan harapan terjadinya pembangunan berkelanjutan yang berimplikasi pada kepentingan dalam negeri Indonesia. Namun, keterbatasan teknologi yang menjadi permasalahan umum di negara-negara berkembang, membuat Indonesia menyuarakan transisi dunia menuju energi yang bersih dan hijau yakni dengan mencanangkan target Net Zero Emission (NZE) hingga tahun 2060.

Dengan adanya komitmen dibidang Energi dan Riset, membuat Indonesia juga menyuarakan sistem pendidikan dunia pada Sherpa Track. Hal ini coba Indonesia sampaikan dalam Education Working Group (EWG) dalam bentuk mengajak negara-negara G20 untuk memperkuat pendidikan global. Permasalahan pendidikan yang kurang merata dan ketimpangan di negara berkembang, membuat sulitnya negara-negara ini dalam mengembangkan sumber daya manusianya.

Selain pendidikan, pemberdayaan dan isu kemanusiaan lainnya juga diupayakan oleh Indonesia. Kesetaraan gender, Indonesia telah menyuarakan isu ini pada Presidensi Italia tahun 2021 dengan memuat 3 isu utama berikut¹¹; (1) Akuntabilitas untuk

Implementasi G20 Empower KPI (*Key Performance Indicators*), (2) Peningkatan keterampilan dan mendorong sektor swasta untuk turut membantu pembiayaan bagi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) sebagai perempuan penggerak pertumbuhan ekonomi; dan (3) Membangun Ketahanan Digital dan Ketrampilan Digital bagi Perempuan pelaku UMKM.

Indonesia juga berperan besar dalam tatanan kesehatan global pasca pandemi. Menurut beliau, pandemi yang menyerang secara global membuat rasa tidak aman yang luar biasa, *outbreak* virus Covid-19 mengakibatkan dampak terkhususnya kesehatan masyarakat. Hal ini juga menjadi sasaran bagi Presidensi Indonesia dalam G20 berikutnya yakni masuk dalam 3 isu prioritas utama yakni Arsitektur Kesehatan Global¹². Kementerian Kesehatan RI mengadakan agenda pertemuan selama presidensi berlangsung dengan mengadakan 3 sesi pertemuan Health Working Group (HWG) dengan sesi pertama, fokus pada pembahasan masalah demi membangun jaringan antara peneliti dan manufaktur di negara anggota G20 baik dari negara maju ke negara berkembang terkait dengan darurat kesehatan masyarakat. Sesi kedua, terkait upaya penguatan jaringan penelitian dan manufaktur darurat kesehatan masyarakat dan sesi ketiga, fokus pada kemitraan pihak pemerintah dan swasta dalam *supporting* jaringan

¹¹ BIRO HUKUM DAN HUMAS, "PENYERAHAN REKOMENDASI TEKNIS G20 EMPOWER DAN WOMAN20 PADA PENYELENGGARAAN G20 MCWE," KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4065/penyerahan-rekomendasi-teknis->

g20-empower-dan-woman20-pada-penyelenggaraan-g20-mcwe.

¹² KOMINFO, "Inilah Keanggotaan Kelompok Kerja, Agenda Prioritas Dan Rangkaian Acara Presidensi G20 Indonesia."

peneliti dan manufaktur untuk selanjutnya upaya memperkuat ekosistem riset dan manufaktur yang berkeadilan akses dan kapasitas pengembangan¹³.

Pada tahun 2017, Indonesia telah memastikan potensi pariwisata sebagai *new industrial concept*. Oleh karena itu, Indonesia membawakan gagasan ini melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) untuk dapat menjadi bahasan dalam G20 mengingat forum ini ada untuk penguatan ekonomi global. Dari proses yang panjang, Workstream tentang pariwisata diangkat menjadi *Working group* yang dikenal sebagai *Tourism Working Group* (TWG). Pelaksanaan TWG ini untuk memperoleh masukan dari para delegasi, khususnya yang terkait dengan isu pedoman, dan *call to concrete actions* pada draft *G20 Bali Guideline*. Menteri Parekraf Sandiaga Uno memastikan agar *tema Bali Guideline on Strengthening Communities and MSMEs as tourism transformation agent* tidak hanya menjadi dokumen semata, tetapi menjadi rencana aksi nyata yang dapat ditindaklanjuti untuk mewujudkan pariwisata yang lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat. TWG G20 memiliki kewajiban untuk berusaha mempertahankan momentum menuju pemulihan pariwisata setelah pandemi. Untuk itu, event yang dilangsungkan selama 2 hari ini membahas bagaimana mendorong

¹³ Fatima Bona, Maria, "Ini Hasil Pertemuan Pertama G-20 Education Working Group 2022," *BeritaSatu*, 2022, <https://www.beritasatu.com/nasional/904723/ini-hasil-pertemuan-pertama-g20-education-working-group-2022>.

pemulihan pariwisata dan membuat pariwisata lebih berkelanjutan, inklusif, serta tangguh melalui *Bali Guideline*. TWG, secara khusus membahas soal lima pilar dasar dalam dunia pariwisata yaitu¹⁴; (1) *human capital (jobs, skill, education, entrepreneurship)*, (2) *digitalization, innovation, and creative economy*, (3) *women and youth empowerment*, (4), *climate action, biodiversity, and circular economy*, dan (5), *policy, governance, and investment framework*.

ANALISIS DIPLOMASI INDONESIA DI SHERPA TRACK

Diplomasi Indonesia memiliki tujuan dan juga landasannya sesuai pada konstitusi. Tentunya dengan penjabaran sebelumnya dapat diketahui peran yang telah dilakukan akan tetapi, apabila coba dilihat dari teori yang digunakan, Indonesia memiliki keterbatasan dalam menjalankan diplomasinya. Diplomasi *Middle Power*, sebuah seni diplomasi yang tidak begitu dominan namun tidak juga terkucilkan. Menurut Bapak Billy Wibisono, Ia tidak begitu setuju apabila Indonesia dikaitkan dengan gaya diplomasi ini. Menurutnya jikapun benar masuk kategori *middle power diplomacy*, maka hal ini tidak bisa di generalisasikan karena banyaknya negara dengan diplomasi *middle power* yang ada dalam G20¹⁵.

¹⁴ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf, "The 1st Tourism Working Group Meeting G20 Bahas Isu Terkait Pariwisata," *Kemenparekraf.Go.Id*, 2022, <https://kemenparekraf.go.id/berita/the-1st-tourism-working-group-meeting-g20-bahas-isu-terkait-pariwisata>.

¹⁵ Hasil Wawancara bersama Billy Wibisono, PELH Kementerian Luar Negeri RI, Tanggal 5 Juli 2023, via Zoom Meetings.

Scholars atau patra ahli diplomasi tetap memandang Indonesia sebagai negara *middle power* yang secara historis dan modalnya telah ada. *bridgebuilder* atau narahubung yang Indonesia telah terapkan dalam diplomasi Indonesia¹⁶. Hal ini diimplementasikan oleh Indonesia dalam dua bentuk strategi, pertama Indonesia sebagai *middle power* akan menjadi *normative balancing*. Artinya, sebagai negara *middle power*, Indonesia akan menguatkan kekuatan dari *small power* untuk dapat mengimbangi ketimpangan yang ada dari *great power*. Penyeimbangan kekuatan tidak memiliki tendensi konfrontatif, akan tetapi lebih kepada penyesuaian kepentingan ditengah perbedaan sehingga muncul hubungan yang lebih dinamis. Kedua, negara *middle power* akan menjadi fasilitator bagi *great power* ataupun *small power*. Indonesia dengan diplomasi *middle power* akan mengakomodasi kepentingan yang ada dalam mendistribusikan kekuatannya dalam menyelesaikan permasalahan internasional. Strategi ini menjadi salah satu upaya Indonesia untuk menjadi *good international citizenship*¹⁷.

Indonesia dalam G20 terkhususnya di Sherpa Track tidak melihat peran dan posisi yang signifikan, menurutnya tidak terlihat jelas apa yang coba Indonesia

perjuangkan. Padahal diplomasi adalah sebuah seni negara dalam memberikan pengaruh untuk kepentingannya, namun beliau tidak melihat dengan jelas hal ini di Sherpa Track. Baiknya pemerintah untuk menetuka agenda-agenda yang jelas di Sherpa Track ini, seperti mencoba untuk membentuk beberapa negara dengan status *emerging countries*. Di G20 terdapat banyak anggota negara yang masih berstatus sebagai *emerging countries* seperti Turki, India, Korea Selatan, Brazil dan Mexico. Dengan membuat perkumpulan ini, Indonesia mampu menutupi kapasitasnya yang terbatas sebagai *middle power* untuk menuntut negara-negara *great power*.

Indonesia tergabung dalam G20 sebagai negara dengan GDP yang nilainya cukup besar, namun hanya satu aspek yang dapat Indonesia andalkan sebagai modalnya dalam diplomasi *middle power* ini. Bu Daulah mencontohkan Indonesia dengan India, Indonesia hanya memiliki 1 aspek yakni GDP ekonomi, sementara India juga memiliki GDP yang besar, selain itu teknologi India sudah sangat maju, pendidikan yang juga sangat baik dan sumber daya manusia mereka yang *massive* membuat India lebih memiliki banyak modal sebagai *middle power* ketimbang Indonesia. diharapkan, Indonesia mampu memberika *impact* dan berdaya guna tetapi dengan cara menggabungkan kekuatan dengan negara-negara yang memiliki aspek-aspek penunjang yang lebih dari satu, ia memberikan contoh bagaimana upaya BRICS (Brazil, Rusia, India, China/Tiongkok dan South Afrika/Afrika Selatan) dalam menekan

¹⁶ Hasil Wawancara bersama Dra.Siti Daulah Khoiriati, MA. Akademisi Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Tanggal 5 Juli 2023, via Zoom Meetings.

¹⁷ Abdul Basir Donny Polanunu, "Indonesia Sebagai Middle Power: Strategi Niche Diplomacy Dalam Manifestasi Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Berbasis Blue Economy," *Padjadjaran Journal of Internasional Relations (PADJIR)* 4, no. 2 (2022): 146–63, <https://doi.org/10.24198/padjir>.

ketergantungan dunia pada mata uang Dollar AS.

Kemudian, Indonesia didalam Sherpa Track selain menyuarakan kepentingan melalui keaktifan dalam setiap *working group*, Ia mengatakan bahwa Indonesia juga telah mengumpulkan negara-negara *middle power* lainnya yang tergabung dalam G20 yakni bernama MIKTA (Mexico, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia). Menurutnya, MIKTA adalah salah satu upaya Indonesia dalam membangun kekuatan dan *supporting* untuk diplomasinya. MIKTA sendiri telah ada sejak tahun 2015 yang pertama kali dibentuk di Ankara, Turki.

SIMPULAN

G20 adalah sebuah forum internasional non-formal yang berdiri dengan latar belakang adanya keresahan terhadap isu ekonomi global. G20 kemudian mulai menjadi forum pembahasan yang kompleks dan terbagi menjadi 2 isu yakni Finance Track (*pure economic/finance*) dan Sherpa Track (*non-economic/finance*). Terdapat 2 mekanisme pembahasan dalam Sherpa Track yakni *Engagement Group* (Non-Pemerintah) dan *Working Group* (Pemerintah). Masing-masing memiliki tugas sebagai wadah aspirasi dalam menentukan kebijakan yang baik dimasing-masing bidang seperti dalam *working group* terdapat 11 isu yang menjadi fokus 20 negara ekonomi dunia.

Status negara berkembang tidak menjadikan diplomasi Indonesia tidak berjalan dengan baik. Indonesia sejak dahulu sudah dikenal sebagai negara yang selalu menyuarakan, mewakilkan dan menengahi. Hal ini menjadikan

diplomasi Indonesia sebagai diplomasi yang berprinsip. Oleh karena itu, dengan statusnya, Indonesia menjalankan konsep diplomasi *middle power* atau berkekuatan menengah adalah diplomasi yang dilakukan dengan tujuan menengahi dan berada di posisi tidak terlalu kuat dan tidak pula terlalu lemah. Dalam teori diplomasi berkekuatan menengah dapat dilihat indikatornya dengan pengelompokan yang didasarkan pada kekuatan, kapasitas, dan pengaruhnya yang tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil dalam ruang lingkup internasional, serta cenderung menunjukkan dukungannya terhadap stabilitas pada sistem dunia itu sendiri.

Mengenai diplomasi Indonesia dalam Sherpa Track, Indonesia sudah melakukan beberapa hal dalam upaya diplomasinya seperti keaktifan Indonesia dalam memberikan suaranya di *Engagement Group* ataupun *Working Group*. Sherpa track secara tidak langsung juga merupakan forum pembasahan isu mengenai kerentanan ekonomi yang bisa terjadi karena adanya kerentanan dalam isu keamanan manusia. Diplomasi Indonesia mencoba terkait isu keamanan manusia ini dengan cara seperti mempromosikan Indonesia dalam sherpa track sebagai perwakilan atas isu-isu yang ada di negara berkembang, perwakilan negara-negara muslim dunia, perwakilan regional ASEAN dan negara-negara kepulauan.

Pihak Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa keamanan manusia yang Indonesia coba bawakan dalam sherpa track, telah dijalankan dengan sangat baik. Billy Wibisono mengatakan Indonesia adalah negra

yang aktif sebagai pemberi suara, perwakilan dan inisiator. Hal ini dicontoh dengan beberapa *Working Group* gagasan Indonesia yang dilanjutkan menjadi pembahasan tetap dalam sherpa track. Selain itu, pihak KEMLU juga menambahkan bahwa dalam usaha memberikan pengaruh yang lebih kuasa dalam diplomasi di sherpa track, Indonesia juga membangun kekuatan, kapasitas dan pengaruhnya dengan aliansi MIKTA (Mexico, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australis) yang senasib sebagai negara dengan kekuatan menengah untuk bersama memperjuangkan tuntutan dalam sherpa track di G20 kepada negara-negara berkekuatan besar dan upaya ini menjadikan diplomasi Indonesia dalam membawakan isu keamanan manusia dalam sherpa track lebih efisien, efektif dan berdaya guna.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Basir Donny Polanunu, "Indonesia Sebagai Middle Power: Strategi Niche Diplomacy Dalam Manifestasi Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Berbasis Blue Economy," *Padjadjaran Journal of Internasional Relations (PADJIR)* 4, no. 2 (2022): 146–63, <https://doi.org/10.24198/padjir>.

BIRO HUKUM DAN HUMAS,
"PENYERAHAN
REKOMENDASI TEKNIS G20
EMPOWER DAN WOMAN20
PADA PENYELENGGARAAN
G20 MCWE," *KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK*,

2022,
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4065/penyerahan-rekomendasi-teknis-g20-empower-dan-woman20-pada-penyelenggaraan-g20-mcwe>.

databoks, "Inilah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sejak 1961," Katadata Media Network, 2018, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/31/inilah-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-sejak-1961>.

David Camroux, "Engaging Indonesia," *SSUE*, September 27, 2013, https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief_01.pdf.

Fatima Bona, Maria, "Ini Hasil Pertemuan Pertama G-20 Education Working Group 2022," *BeritaSatu*, 2022, <https://www.beritasatu.com/nasional/904723/ini-hasil-pertemuan-pertama-g20-education-working-group-2022>.

Hasil Wawancara bersama Billi Wibisono, PELH Kementerian Lua Negeri RI, Tanggal 27 Juni 2023, via Zoom Meetings.

Hasil Wawancara bersama Dra.Siti Daulah Khoiriati, MA. Akademisi, Dosen Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Tanggal 5 Juli 2023, via Zoom Meetings.

Jordaan Eduard, "The Concept of a Middle Power in International Relations: Distinguishing between Emerging and Traditional Middle Powers," *Politikon: South African Journal of Political Studies* 30, no. 1 (2003): 165–81,

https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=1393&context=sooss_research. Hal. 165.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf, “The 1st Tourism Working Group Meeting G20 Bahas Isu Terkait Pariwisata,” *Kememparekraf.Go.Id*, 2022, <https://kememparekraf.go.id/berita/the-1st-tourism-working-group-meeting-g20-bahas-isu-terkait-pariwisata>.

KOMINFO, “Inilah Keanggotaan Kelompok Kerja, Agenda Prioritas Dan Rangkaian Acara Presidensi G20 Indonesia.”

Pada, dkk., *Presidensi G20 Indonesia: Prioritas, Potensi Capaian, Dan Langkah Ke Depan*. Hal.65-66.

Rukimi. D.A, Wiwiek & M.Fathun, Laode “Diplomasi Ekonomi Indonesia di Dalam Rezim Ekonomi G20 Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo” melalui <https://intermestic.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/download/223/63> pada tanggal 15 Desember 2022.